

## PENGARUH KESADARAN MASYARAKAT, SANKSI PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA SAMSAT KOTA BATAM

### THE INFLUENCE OF COMMUNITY CONSCIOUSNESS, TAX SANCTION AND SERVICE QUALITY TOWARD TAX MANDATORY COMPLIANCE IN PAYING MOTOR VEHICLE TAXES IN SAMSAT KOTA BATAM

Nila Sari Agustin<sup>1</sup>, Rizki Eka Putra<sup>2</sup>

<sup>1</sup>(Akuntansi, Ekonomi, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia)

<sup>2</sup>(Akuntansi, Ekonomi, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia)

<sup>1</sup>nila83000@gmail.com, <sup>2</sup>rizkiekaputra@gmail.com

#### ABSTRAK

*Semakin majunya perkembangan zaman membuat seluruh lapisan masyarakat dari golongan menengah keatas sampai menengah kebawah semakin dapat memenuhi segala kebutuhan yang ada. Salah satu kebutuhan yang wajib dimiliki yaitu transportasi. Alat transportasi memang sangat penting dimiliki karena mampu menunjang kegiatan masyarakat. Alat transportasi seperti kendaraan bermotor tidak menjadi barang yang mewah bagi masyarakat, melainkan menjadi salah satu kebutuhan pokok mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai latar belakang Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kota Batam. Dalam Penelitian ini penulis juga menggunakan metode penelitian kuantitatif, dimana sampel penelitian adalah 100 wajib pajak yang akan membayar pajak di Samsat Kota Batam. Berdasarkan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel kesadaran mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,454 dan  $t_{hitung}$  sebesar -0,752 maka  $H0_1$  ditolak, variabel sanksi sebesar 0,561 dan  $t_{hitung}$  sebesar -0,583 maka  $H0_2$  ditolak, dan variabel kepatuhan tingkat signifikansi sebesar 0,048 dan  $t_{hitung}$  sebesar 2,002 maka  $H0_3$  diterima.*

**Kata Kunci :** Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak.

#### ABSTRACT

*The progress of the development of the times make all levels of society from the middle class to the upper to middle and lower levels increasingly able to meet all existing needs. One of the must-have needs is transportation. Transportation tools are very important because they can support community activities. Transportation equipment such as motorized vehicles are not a luxury item for the community, but rather become one of their basic needs in carrying out daily activities. This study aims to provide an overview of the background of the Effect of Public Awareness, Tax Sanctions and Service Quality on Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Taxes in Batam City Samsat. In this study the author uses quantitative research methods, where the study population is taxpayers who will pay taxes in Batam City Samsat. Based on the testing of the hypothesis, it is shown that the variables of consciousness have a significance level of 0.454 and tcount of -0.752, then  $H0_1$  is rejected, the sanction variable is 0.561 and tcount is -0.583,  $H0_2$  is rejected, and the compliance variable is 0.048 and tcount is 2.002.*

**Keywords:** Public Awareness, Tax Sanctions, Service Quality, Taxpayer Compliance.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Semakin majunya perkembangan zaman membuat seluruh lapisan masyarakat dari golongan menengah keatas sampai menengah kebawah semakin dapat memenuhi segala kebutuhan yang ada. Salah satu kebutuhan yang wajib dimiliki yaitu transportasi. Alat transportasi memang sangat penting dimiliki karena mampu menunjang kegiatan masyarakat. Alat transportasi seperti kendaraan bermotor tidak menjadi barang yang mewah bagi masyarakat, melainkan menjadi salah satu kebutuhan pokok mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Kendaraan bermotor semakin banyak dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat, akan tetapi dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang terdaftar pada Samsat Batam Centre Kota Batam dari tahun 2015-2018 jumlah wajib pajak mengalami penurunan pada tahun 2016-2017 dan mengalami kenaikan pada tahun 2018. Meningkatnya daya beli masyarakat pada tahun 2018 terhadap kendaraan bermotor tentu memberikan dampak yang positif bagi pemerintah khususnya Samsat Batam Centre yang berada di Kota Batam.

Menurut Ilhamsyah dkk (2016) kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya,

Kesadaran merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban

membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Apabila wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tulus, ikhlas dan menyadari betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan daerahnya, maka tidak akan terjadi ketidakpatuhan dalam membayar pajak (Susilawati, 2013).

Faktor lain yang dianggap mempengaruhi kepatuhan membayar pajak adalah sanksi pajak, pelaksanaan sanksi pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak akan patuh karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan illegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Dan salah satu upaya dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan yang diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini mengambil judul Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam.

### Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian ini dibuat agar penelitian ini tidak menyimpang dari arah dan sasaran penelitian, serta dapat mengetahui sejauh mana hasil penelitian dapat dimanfaatkan. Batasan masalah dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Apakah kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor ?

2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor ?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar wajib pajak kendaraan bermotor.

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **Kesadaran Masyarakat**

Kesadaran masyarakat wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut Indrawan (2014) kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami dan mengerti tentang cara membayar pajak. Menurut Arum & Zulaika (2012) kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Menurut Widayati dan

Nurlis (2010) menguraikan bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. kesadaran bahwa pajak merupakan bantuan partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.

#### **Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan Undang-Undang perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Landasan hukum mengenai sanksi administrasi diatur dalam masing-masing pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Pada hakikatnya, penerapan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

#### **Kualitas Pelayanan**

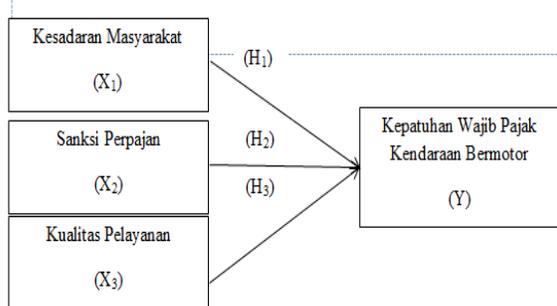
Kualitas pelayanan ini dapat diartikan sebagai tingkat kepuasan tamu atau konsumen. Sedangkan tingkat kepuasan tamu ini sendiri dapat diperoleh

dari perbandingan atas jenis pelayanan yang nyata diterima oleh konsumen dengan jenis pelayanan yang diharapkan oleh konsumen. Jenis kualitas pelayanan yang baik adalah jenis pelayanan yang memuaskan dan sesuai dengan pelayanan yang diharapkan oleh konsumen. Namun jika pelayanan ini dapat melampaui harapan konsumen, maka jenis kualitas pelayanan ini dapat dikategorikan sebagai pelayanan yang sangat berkualitas atau sangat memuaskan.

### Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan Wajib Pajak yang melaksanakan hak dan khususnya kewajiban, secara disiplin, sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku dan tidak menyimpang dari ketentuan perpajakan.

### Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

### Hipotesis

H1=terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran masyarakat dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

H2=terdapat pengaruh yang signifikan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

H3=terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

## METODE PENELITIAN

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang dipakai oleh peneliti untuk memperoleh data yang ditelitinya. Penelitian ini merupakan penelitian survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari populasi dengan mengandalkan kuesioner sebagai instrument pengumpulan data.

#### 1. Metode kuesioner

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner merupakan teknik yang paling sederhana dan mudah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan metode kuesioner ini, diantaranya adalah berupaya sedapat mungkin mempersingkat kuesioner dengan hanya menanyakan hal-hal penting,

karena sebagian besar responden akan keberatan jika harus mengisi kuesioner yang panjang (terdiri dari banyak item). Kuesioner ini akan dibagikan pada wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) di Samsat Kota Batam dengan asumsi mereka mau menjawab semua pertanyaan yang telah disusun penulis

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Uji Instrumen Validitas

Item	R hitung	R tabel	Keterangan
KS 1	0,746	0,165	Valid
KS 2	0,664	0,165	Valid
KS 3	0,676	0,165	Valid
KS 4	0,540	0,165	Valid

Sumber: Data diolah 2019

**Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Kesadaran Masyarakat**

Hasil tabel 4.5 menunjukkan variabel kesadaran masyarakat mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

Item	R hitung	R tabel	Keterangan
S 1	0,621	0,165	Valid
S 2	0,696	0,165	Valid
S 3	0,763	0,165	Valid
S 4	0,717	0,165	Valid

Sumber: Data diolah 2019

**Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan**

Hasil dari tabel 4.6 menunjukkan variabel sanksi perpajakan mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

Item	R hitung	R tabel	Keterangan
KA 1	0,720	0,165	Valid
KA 2	0,687	0,165	Valid
KA 3	0,805	0,165	Valid
KA 4	0,648	0,165	Valid

Sumber: Data diolah 2019

**Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan**

Hasil tabel 4.7 menunjukkan variabel kualitas pelayanan mempunyai

kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

Item	R hitung	R tabel	Keterangan
KP 1	0,591	0,165	Valid
KP 2	0,796	0,165	Valid
KP 3	0,734	0,165	Valid
KP 4	0,583	0,165	Valid

Sumber: Data diolah 2019

**Tabel 4.8 Hasil Uji Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil Tabel 4.8 menunjukkan variabel Kepatuhan wajib pajak mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

### Uji Instrumen Reliabilitas

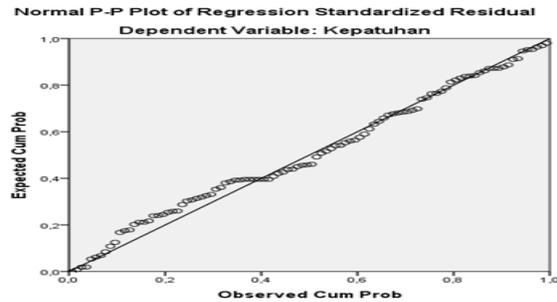
Variabel	Alpha Crobach	Keterangan
Kesadaran Masyarakat	0,555	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,653	Reliabel
Kualitas Pelayanan	0,685	Reliabel
Kepatuhan Wp	0,615	Reliabel

Sumber: Data diolah 2019

**Tabel 4.9 Hasil Uji Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan memiliki nilai Alpha Crobach > 0,50-0,70. Dengan demikian seluruh variabel penelitian dinyatakan reliabel.

### Uji Asumsi Klasik Normalitas



Dengan melihat tampilan pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

### Uji Asumsi Klasik Multikolinieritas

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kesadaran Masyarakat	,950	1,053
	Sanksi Perpajakan	,936	1,069
	Kualitas Pelayanan	,984	1,016

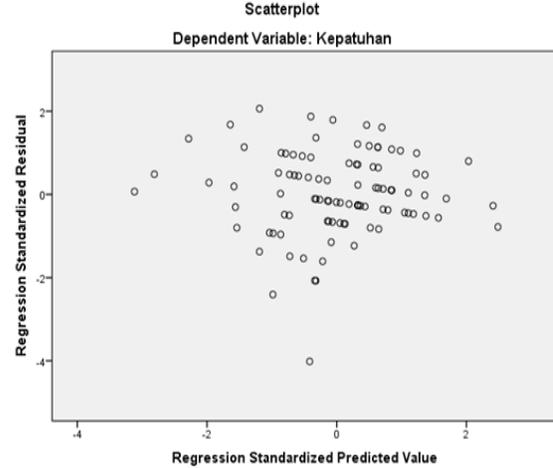
a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Data diolah 2019

Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinieritas

Dari data diatas menunjukkan bahwa hasil nilai Tolerance variabel independen yaitu kesadaran, sanksi dan juga kualitas pelayanan yang memiliki nilai Tolerance lebih dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan dari nilai Variance Inflation Factor (VIF) menunjukkan nilai kurang dari 10. Hal ini berarti dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas antar variabel dalam model regresi penelitian ini.

### Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas



Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil dari grafik Scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar diatas maupun dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi penelitian ini, sehingga model regresi tersebut layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen kepatuhan wajib pajak berdasarkan masukan variabel independen Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan dan Kualitas pelayanan.

### Uji Hipotesis Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,236 <sup>a</sup>	,056	,026	20,36347

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan

Sumber: Data diolah 2019

Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel 4.13 diatas maka dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada *R Square* sebesar 0,056 atau 5,6%. Nilai ini menunjukkan

bahwa kepatuhan wajib pajak tahun 2018 dijelaskan oleh 5,6% variabel kesadaran, sanksi dan kepatuhan. Sedangkan sisanya sebesar 0,044 atau 4,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model regresi ini.

### Uji Hipotesis Uji T

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16,095	3,080		5,225	,000
	Kesadaran Masyarakat	-,096	,127	-,077	-,752	,454
	Sanksi Perpajakan	-,066	,113	-,060	-,583	,561
	Kualitas Pelayanan	,189	,095	,200	2,002	,048

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Data diolah 2019

**Tabel 4.14 Hasil Uji T**

#### Pengujian Hipotesis 1

Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat bahwa variabel kesadaran mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,454 dan  $t_{hitung}$  sebesar -0,752. Karena tingkat nilai signifikansi lebih besar dari  $\alpha = 5\%$  atau 0,05 menunjukkan bahwa  $H_1$  diterima dan  $H_{01}$  ditolak.

#### Pengujian Hipotesis 2

Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat bahwa variabel sanksi mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,561 dan  $t_{hitung}$  sebesar -0,583. Karena tingkat signifikansi lebih besar dari  $\alpha = 5\%$  atau 0,05 menunjukkan bahwa  $H_2$  diterima dan  $H_{02}$  ditolak.

#### Pengujian Hipotesis 3

Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat bahwa variabel kualitas mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,048 dan  $t_{hitung}$  sebesar 2,002. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$  atau 0,05 menunjukkan bahwa  $H_3$  ditolak dan  $H_{03}$  diterima.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang pengaruh kesadaran masyarakat, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Kota Batam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran Masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

### Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan metode kuesioner wawancara langsung dengan responden, karena dengan metode wawancara responden akan lebih paham dengan pertanyaan yang kita maksud.
2. Ketika menggunakan metode survey dengan kuesioner hendaknya lebih memperhatikan proses ketika responden melakukan pengisian kuesioner sehingga data yang diperoleh lebih valid.

### Keterbatasan

1. Peneliti tidak bisa mendampingi responden satu per satu dalam pengisian kuesioner, dikarenakan dalam satu waktu lebih dari satu responden yang datang ke SAMSAT. Oleh karena itu, dalam mengisi kuesioner responden kurang paham atau tidak jelas dengan pertanyaan yang ada dalam kuesioner.

## DAFTAR PUSATAKA

- Arum, Z. (2012). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Studi di wilayah KPP Pratama Cilacap). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol 1 : h:1-8
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Vol. Cetakan ke VIII: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ilhamsyah, dkk. (2016). Pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 8 No 1
- Indrawan, D. (2014). Pengaruh pengetahuan dan pemahaman, efektifitas sistem perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kemauan membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai variabel intervening (Studi empiris pada KPP Pratama Bangkinang). *JOM FEKON*, 1(2).
- Indriantoro, Nur dan Bambang, Supomo. (2011). "Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen". Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan (Edisi Revisi 2011)*. Yogyakarta : Andi.
- Siti Kurnia Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V.W. 2014, *SPSS Untuk Penelitian*, Pustaka Baru: Jakarta
- Susilawati, Ketut Evi dan Ketut Budiarta. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 4.2 (2013):345-357
- Uma Sekaran. (2009). *Research Methods For Business (Metodologi Penelitian untuk Bisnis)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widayanti dan Nurlis.2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak WPOP yang Melakukan Pekerjaan Bebas.(Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga). *Simposium Nasional Akuntansi* 13